

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**



**KEPALA DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**

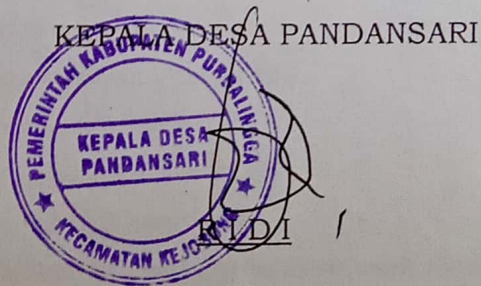
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Pandansari Kecamatan Pandansari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Pandansari khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik. Kami pun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat.



DAFTAR ISI

SAMPUL	
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	
A. TUJUAN	4
B. VISI MISI	4
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	5
II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	5
III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	6
IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	7
V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7
VI. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA.....	8
VII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	8
A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023	8
B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023	9
VIII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI	9
IX. PENUTUP	
A. PENUTUP	11

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rincian Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Tahun 2023 (Form A.1)
2. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Form. B)
3. RincianKegiatanBidangPenyelenggaraanPemerintahan (Form C.1)
4. RincianKegiatanBidangPelaksanaan Pembangunan (Form C.2)
5. RincianKegiatanBidang Pembinaan Kemasyarakatan (Form C.3)
6. RincianKegiatanBidangPemberdayaanMasyarakat (Form C.4)
7. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa (Form C.5)
8. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember.

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI

Visi Desa Pandansari Periode Tahun 2019 – 2025 Mewujudkan Desa Pandansari yang Aman, Sejahtera, maju, mandiri menjunjung tradisi bernafaskan nilai-nilai religi.

Misi Desa Pandansari, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Desa Pandansari :

1. Pembangunan Prasarana Fisik Perdesaan, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pola Pikir serta Pemberdayaan Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dengan mengedepankan Pelayanan masyarakat secara Profesional, tertib, jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penggalan dan Pemanfaatan Potensi Desa disertai dengan Pelestarian Budaya masyarakat yang hidup rukun, gemar berswadaya dan bergotong royong;
4. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Peternakan, Jasa dan Industri Kecil;
5. Pembinaan dan Pelestarian Budaya, norma dan nilai yang berkembang dimasyarakat;
6. Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai keagamaan, Pengamalan serta Pembinaan kerukunan antar umat beragama.

Misi Desa, adapun Misi Desa Pandansari adalah

Program Fisik :

1. Pengembangan dan peningkatan sarana jalan yang menunjang transportasi, baik jalur pertanian, perkebunan warga dan lintas Desa.
2. Membangun Sarana olah raga yang layak bagi generasi muda terutama volley dan Sepakbola
3. Peningkatan sarana pelayanan dasar Desa
4. Fasilitas pengadaan pupuk bagi petani
5. Penyusunan Perencanaan Desa secara partisipatif

Program Non Fisik:

1. Menciptakan aparat pemerintahan yang profesional demi mewujudkan pelayanan yang maksimal
 2. Mendorong lembaga yang ada di Desa dalam peningkatan Kapasitas penyiapan fasilitas dan pengelolaan biaya operasional kelembagaanya.
 3. Fasilitasi Beasiswa anak sekolah ,SD,SLTP,SLTA bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi.
 4. Meningkatkan kapasitas kelompok PKK dan Majelis Ta,lim
 5. Membina kelompok Tani dan peternak dalam pengelolaan pertanian dan peternakan
- C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa kelembagaan desa serta Masyarakat Desa Pandansari pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjaring aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah (Buruh,Tani)sampai pada tingkatan paling atas yaitu hasil identifikasi dan singkronisasi dari Rencana jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Purbalingga serta penjabaran Visi Misi Desa .Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Oleh Desa Pandansari adalah :

- a. Belum memadainya sarana prasarana Desa seperti inprastruktur jalan,pendidikan maupun ekonomi,kesehatan dan komunikasi.
- b. Masih rendahnya Kapasitas perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- c. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Desa
- d. Kapasitas Kelembagaan Desa Masih Rendah
- e. Belum ada fasilitas akses informasi Desa berbasis Teknologi
- f. Terbatasnya pembinaan generasi muda Desa
- g. Tingkat penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah
- h. tidak tersedianya tenaga kesehatan yang berdomisili di Desa serta infrastruktur kesehatan masih belum lengkap
- i. Masyarakat sangat kesulitan akses air bersih pada saat musim kemarau
- j. Kesejahteraan Masyarakat masih sangat rendah.
- k. Kapasitas Aparat masih rendah
- l. Pemamfaatan irigasi Desa belum maksimal
- m. kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa
2. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa
3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
5. Tunjangan/Honorarium BPD
6. Penyediaan Operasional BPD
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
9. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
10. Penyusunan,Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
11. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
12. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)
14. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ,dll)
15. Pengembangan Sistem Informasi Desa
16. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
2. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa
3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
5. Tunjangan/Honorarium BPD
6. Operasional BPD
7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
8. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
9. Penyusunan,Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
10. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
11. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)
13. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ,dll)
14. Pengembangan Sistem Informasi Desa
15. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan PAUD/TPQ/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal
2. Dukungan Bea Siswa Pendidikan bagi siswa Miskin/Berprestasi
3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa
4. Penyelenggaraan Posyandu
5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
6. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
7. Pemeliharaan Jembatan Desa
8. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/balai Kemasyarakatan
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Lingkungan
 - a. Peningkatan Jalan RT 003 s.d RT 004
 - b. Pembangunan Talud Jalan Dusun II dan III
 - c. Peningkatan Jalan RT 009 s.d RT 010
 - d. Peningkatan Jalan RT 014/005
 - e. Peningkatan Jalan RT 018/008
 - f. Pembangunan Talud Jalan RT 011 s.d RT 007
 - g. Peningkatan Jalan Lingkungan RT 017/007
 - h. Operasional Kegiatan
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani
11. Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jembatan Milik Desa
12. Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
13. Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura Batas Desa
14. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
15. Pembangunan Sarana Air bersih
16. Penyelenggaraan Informasi Desa
17. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata

Program Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan PAUD/TPQ/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal
2. Dukungan Bea Siswa Pendidikan bagi siswa Miskin/Berprestasi
3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa
4. Penyelenggaraan Posyandu
5. Pemeliharaan Jalan Desa.
6. Pemeliharaan Jembatan Desa

7. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/balai Kemasyarakatan.
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
 - a. Pengaspalan Jalan RT 003 s.d RT 004
 - b. Pengaspalan Jalan RT 009 s.d RT 010
 - c. Pembangunan Rabat Beton RT 014
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - a. Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Sabrang
10. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - a. Pembangunan Drainase Beton RT 011 (Bu Rohyati)
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - a. Rehabilitasi Gedung/Pembangunan Pagar Kantor Desa
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - a. Pembangunan Gapura DRPPA
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Ke Rumah Tangga
15. Penyelenggaraan Informasi Desa
 - a. Baliho/Banner
16. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana Transportasi Desa
 - a. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
17. Pembangunan Prasarana Pariwisata

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kordinasi Pembinaan Keamanan,Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
2. Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan(HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
4. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan LPMD
 - b. Pembinaan RT/RW
 - c. Pembinaan PKK
 - d. Operasional KPMD

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kordinasi Pembinaan Keamanan,Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
2. Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan(HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
4. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan LPMD
 - b. Pembinaan RT/RW
 - c. Pembinaan PKK
 - d. Operasional KPMD

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa
3. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Peningkatan Kapasitas BPD
5. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
6. Pengembangan sarana Prasarana UMKM dan Koperasi
7. Dukungan Permodalan BUMDEs

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat desa
3. Peningkatan Kapasitas BPD
4. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
5. Pengembangan sarana Prasarana UMKM dan Koperasi
6. Dukungan Permodalan BUMDes.

VI. PROGRAM KERJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penanggulangan Bencana
2. Penanganan Keadaan Mendesak

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - a. Pengadaan sarana Prasarana
 - b. Droping Air Bersih
2. Penanganan Keadaan Mendesak
 - a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

VII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Pandansari Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. Pendapatan desa	Rp. 2.194.944.000,00,-
2. Belanja desa	Rp. 2.165.767.095,00,-
a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 814.387.333,00,-
b) Bidang Pembangunan	Rp. 1.144.953.262,00,-
c) Bidang pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 62.070.000,00,-
d) Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 29.956.500,00,-
e) Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp. 114.400.000,00,-
Surplus/ Defisit	Rp. 29.176.905,00,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.823.095,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 35.000.000,00,-

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Pandansari Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdapat Perubahan Sebanyak Satu Kali dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. Pendapatan desa	Rp. 2.196.750.700,00,-
2. Belanja desa	Rp. 2.167.573.795,00,-
f) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 824.219.033,00,-
g) Bidang Pembnagunan	Rp. 1.134.868.262,00,-
h) Bidang pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 65.755.000,00,-
i) Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 28.456.500,00,-
j) Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp. 114.275.000,00,-
Surplus/ Defisit	Rp. 29.176.905,00,-

3. Pembiayaan Desa
 - c. Penerimaan Pembiayaan Rp. 5.823.095,00,-
 - d. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 35.000.000,00,-

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 terdapat tiga Kali Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 terakhir dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. Pendapatan desa Rp. 2.337.971.700,00,-
2. Belanja desa Rp. 2.236.794.795,00,-
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 830.817.033,00,-
 - b. Bidang Pembnagunan Rp. 1.164.631.962,00,-
 - c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp. 66.555.000,00,-
 - d. Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan Rp. 50.035.500,00,-
 - e. Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp. 124.755.300,00,-
 - Surplus/ Defisit Rp. 101.176.905,00,-
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 5.823.095,00,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 107.000.000,00,-

Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan desa Rp. 1.979.781.072,00,-
2. Belanja desa Rp. 1.860.762.482,00,-
 - k) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 827.143.982,00,-
 - l) Bidang Pembnagunan Rp. 801.302.000,00,-
 - m) Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp. 60.285.000,00,-
 - n) Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan Rp. 49.506.500,00,-
 - o) Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp. 122.525.000,00,-
 - Surplus/ Defisit Rp. 119.018.590,00,-
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 5.823.095,00,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 107.000.000,00,-
 - c. Silpa Tahun Berjalan Rp. 17.841.685,00,-

B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Desa Pandansari Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023, (dengan rincian terlampir)

VIII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari				
1	Keberhasilan yang dicapai	a	Meningkatkan Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Desa	
		b	Meningkatnya Realisasi PBB	
		c	Penataan Perencanaan Desa	
2	Permasalahan yang dihadapi	a	Minimnya Kesadaran dari Aparatur Pemerintah Desa	
		b	Kesadaran Partisipasi Masyarakat	
3	Solusi/Upaya yang ditempuh	a	Melaksanakan Pembinaan Secara berkelanjutan	
		b	Sosialisasi Pentingnya PBB	

B Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
1	Keberhasilan yang dicapai	a	Terbangunnya Sarana Prasarana Jalan Desa
		b	Terbangunnya Sarana Air Bersih yang memadai
2	Permasalahan yang di hadapi	a	Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk memelihara Hasil Pembangunan Desa
		b	Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Pemanfaatan Air Bersih
3	Solusi/Upaya yang ditempuh	a	Mengkampanyekan Gerakan Kesadran Masyarakat
		b	Sosialisasi Pentingnya Pemanfaatan Air Bersih
C Bidang pembinaan Kemasyarakatan			
1	Keberhasilan yang dicapai	a	Fasilitasi Prasarana Olahraga
		b	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
		c	Meningkatnya Peran Lembaga Desa
2	Permasalahan yang dihadapi	a	Kurangnya Kesadaran Untuk menjaga Fasilitas yang sudah ada
		b	Kesadaran Pertisipasi Pemuda dalam Kegiatan Olahraga
3	Solusi/Upaya yang ditempuh	a	Melaksanakan Pembinaan Secara berkelanjutan
D Bidang pemberdayaan Masyarakat			
1	Keberhasilan yang dicapai	a	Menjadi Desa Rujukan DRPPA
		b	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Permasalahan Anak dan Perempuan
		c	Fasilitasi UMKM
2	Permasalahan yang dihadapi	a	Belum semua Warga Masyarakat Tahun Program DRPPA
		b	Geliat UMKM Masih Belum memadai
3	Solusi/Upaya yang ditempuh	a	Melaksanakan Pembinaan dan Sosialisai Secara berkelanjutan
E Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan darurat dan Mendesak			
1	Keberhasilan yang dicapai	a	Tersalurkannya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
		b	Terlaksananya bantuan Air Bersih
2	Permasalahan yang dihadapi	a	Beberapa Penerima Menerima Bansos dari Sumber lainnya
		b	Fasilitas Penampungan Air Bersih diwilayah belum memadai
3	Solusi/Upaya yang ditempuh	a	Berkordinasi dengan Kepala Wilayah untuk melakukan Croscek

X. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada Bagian Ketiga pasal 8 poin 1 "*Laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.*"

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babak terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok Kesimpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Pandansari
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Pandansari tahun anggaran 2023 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Pandansari.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pandansari Akhir Tahun Anggaran 2023. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Aparatur Pemerintah Desa Pandansari, Lembaga Desa dan kepada Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa Pandansari.

Dan tidak lupa kami sampaikan Ucapan terima Kasih kepada Badan Permasyarakatan Desa Pandansari yang telah bersinergi bersama dengan Pemerintah Desa Pandansari dalam melaksanakan Kegiatan Di Tahun 2023 sehingga semua Tahapan dan Proses dari Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan pelaporan senantiasa memberikan support dan dukungan untuk Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2023.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.



LAMPIRAN I : RINCIAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
(Perdes Nomor 09 Tahun 2022)

I.	PENDAPATAN DESA	: Rp 2.194.944.000,-	
II.	BELANJA DESA		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	814.387.333,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	1.144.953.262,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	62.070.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp	29.956.500,-
	e. Bid.Penangulangan Bencana,darurat dan Mendesak desa	Rp	114.400.000,-
	Jumlah Belanja	Rp	2.165.767.095,-
	Surplus/(Defisit)	Rp	29.176.905,-
III.	PEMBIAYAAN		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.823.095,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000.000,-
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	(29.176.905)-

LAMPIRAN I : RINGKASAN PERUBAHAN APBDES TAHUN 2023

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
(Perdes Nomor 2 Tahun 2023)

I.	PENDAPATAN DESA	: Rp 2.196.750.700,-	
II.	BELANJA DESA		
	f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	824.219.033,-
	g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	1.134.868.262,-
	h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	65.755.000,-
	i. Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp	28.456.500,-
	j. Bid.Penangulangan Bencana,darurat dan Mendesak desa	Rp	114.275.000,-
	Jumlah Belanja	Rp	2.167.573.795,-
	Surplus/(Defisit)	Rp	29.176.905,-
III.	PEMBIAYAAN		
	c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.823.095,-
	d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000.000,-
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	(29.176.905)-

**RINGKASAN PENJABARAN KETIGA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
(Perkades Nomor 6 Tahun 2023)**

IV.	PENDAPATAN DESA	: Rp 2.337.971.700,-	
V.	BELANJA DESA		
	k. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	830.817.033,-
	l. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	1.164.631.962,-
	m. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	66.555.000,-
	n. Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp	50.035.500,-
	o. Bid.Penangulangan Bencana,darurat dan Mendesak desa	Rp	124.755.300,-
	Jumlah Belanja	Rp	2.236.794.795,-
	Surplus/(Defisit)	Rp	101.176.905,-
VI.	PEMBIAYAAN		
	e. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.823.095,-
	f. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	107.000.000,-
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	(101.176.905),-

Form B

LAMPIRAN I : RINGKASAN REALISASI APBD DES TAHUN 2023

**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
(Perdes Nomor 1 Tahun 2024)**

A.	Pendapatan Desa	: Rp 1.979.781.072,-	
B.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	827.143.982,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	801.302.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	60.285.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp	49.506.500,-
	e. Bid.Penangulangan Bencana,darurat dan Mendesak desa	Rp	122.525.000,-
	Jumlah Belanja	Rp	1.860.762.482,-
	Surplus/(Defisit)	Rp	119.018.590,-
C.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.823.095,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	107.00.000,-
	Jumlah Pembiayaan	Rp	(101.176.905),-
D.	Silpa Tahun Berjalan	Rp	17.841.685,-

LAMPIRAN KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

No	Sub Bidang	Uraian	Banyaknya/ Jumlah
1.	Peraturan Perundang-undangan	a. Peraturan Desa	5
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	9
		d. Keputusan Kepala Desa	20
2	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk	4.238
		1). Laki-Laki	2.142
		2). Perempuan	2.096
		3). Jumlah Kepala Keluarga	1.387
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	4.238
		1). Tidak/Belum Sekolah	758
		2) Belum Tamat SD/Sederajat	622
		3) Tamat SD/Sederajat	1.856
		4) SLTP/Sederajat	628
		5) SLTA/Sederajat	336
		6) Diploma I/II	2
		7) Akademi/Diploma III	8
		8) Diploma IV/Strata I	28
		9) Strata II	-
		10) Strata III	-
		c. Jumlah Perubahan Penduduk	
		1) Jumlah Kelahiran	30
		2) Jumlah Kematian	34
		3) Jumlah Datang Penduduk	28
		4) Jumlah Pindah Penduduk	31

No	Sub Bidang	Uraian	Jumlah
	Kependudukan	A. Pekerjaan	
		1) Belum/Tidak Bekerja	688
		2) Mengurus Rumah Tangga	480
		3) Pelajar/Mahasiswa	809
		4) Pensiunan	2
		5) Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7
		6) Tentara nasional Indonesia	0
		7) Kepolisian RI(POLRI)	0
		8) Perdagangan	18
		9) Petani/Pekebun	513
		10) Industri	-
		11) Transportasi	-
		12) Karyawan Swasta	1322
		13) Karyawan Honorer	2
		14) Buruh Harian Lepas	111
		15) Buruh Tani/Perkebunan	90
		16) Buruh Nelayanan/Perikanan	-
		17) Tukang Listrik	1
		18) Tukang Batu	4
		19) Tukang Kayu	9
		20) Guru	5
		21) Sopir	5
		22) Pedagang	43
		23) Perangkat Desa	12
		24) Kepala Desa	1
		25) Wiraswasta	94
		26) Lainnya	19
		B. Kepemilikan Akte Kelahiran	
		1) Sudah Memiliki	2089
		2) Belum Memiliki	2149

No	Sub Bidang	Uraian	Jumlah
3	Pertanahan	a) Status Tanah	
		1) Sertifikat Hak Milik	458 Bidang
		b) Luas tanah	285,84 ha
		1) Bersertifikat	458 Bidang
		2) Belum Bersertifikat	2.125 Bidang
		3) Tanah Kas Desa	30 Bidang
		4) Jumlah Bidang	2.613 Bidang
		c) Peruntukan	
		1) Jalan	130,241 ha
		2) Tanah Ladang	123,456 ha
		3) Sawah	27 ha
		4) Bangunan Umum/Perumahan	1.186 ha
		5) Fasilitas Umum/Pemukaman	3,957 ha
		d) Perubahan Tanah/mutasi Tanah	55
		e) Pagu Pajak	82.015.556
		1) Tanah Kas Desa	2.199.558
		2) Masyarakat umum	79.815.998
		3) Pelunasan	26 Juli 2023
4	Manajemen Pemerintahan	a) Jumlah Aparatur Pemdes	13 Orang
		1) Non PNS	13 Orang
		b) Jumlah Anggota BPD	7 Orang
		c) Musyawarah Dusun	7 Kali
		d) Musyawarah Desa	5 Kali
		e) Musrenbangdes	1 Kali
		f) Rapat Evaluasi	4 Kali
		g) Rapat Rutin Pemdes	12 Kali

No	Sub Bidang	Uraian	Jumlah
5	Pelayanan Masyarakat	Jenis Surat Permohonan	
		1) Permohonan Surat Keterangan	366 Orang
		2) Permohon SKCK	74 Orang
		3) Permohon KTP	84 Orang
		4) Permohon Akte Kelahiran	15 Orang
		5) Permohon Pernikahan	21 Orang
		6) Permohon Perceraian	12 Orang
6	Ketentraman dan Ketertiban	1) Pembinaan SATLINMAS	
		a) Jumlah SATLINMAS	23 orang
		b) Alat Pemadam Kebakaran	-
		c) Jumlah SATLINMAS Terlatih	3 Orang
		2) Ketentraman dan Ketertiban	
		a) Jumlah Kejadian Kriminal	1 Kali
		b) Jumlah Bencana Alam	1 Kali
		c) Jumlah Operasi Penertiban	1 Kali
		d) Jumlah Pos Kamling	18 Buah
7	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan	
		a) RT/RW -----Ada/Tidak	Ada
		b) PKK -----Ada/Tidak	Ada
		c) Karang Taruna-Ada/Tidak	Ada
		d) Posyandu -----Ada/Tidak	Ada
		e) LPMD -----Ada/Tidak	Ada
		2) Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat- Ya/Tidak	Ya
		3) Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra pemerintah Desa- Ya/Tidak	Ya

	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	4) Lembaga Kemasyarakatan diikutsertakan dalam pelaksanaan program sector dan program pemerintah daerah- Ya/ Tidak	Ya
		5) Lembaga Adat ---- Ada /Tidak	-
		6) Lembaga Adat di bentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan- Ya /Tidak	-

Form C.2

LAMPIRAN KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

No	Sub Bidang	Uraian	Jumlah
1	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	20,6 Km
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	11 Km
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jembatan (Buah)	7 Buah
		e. Kantor Kepala Desa (Ada/ Tidak)	Ada
2	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Pendidikan Umum	
		1. Kelompok Bermain/PAUD (Jumlah)	2
		2. Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	2
		3. Sekolah Dasar (Jumlah)	2
		4. Sekolah Menengah (Jumlah)	-
		5. SMK (Jumlah)	-
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1. Pendidikan Pesantren	-
		2. Madrasah	1
		3. Sekolah Luar Biasa	-
		4. Balai Latihan Kerja	-
		5. Taman Pendidikan Alquran (TPQ)	2
3	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta	-
		c. Rumah Sakit Kusta	-
		d. Rumah Sakit Mata	-
		e. Rumah Sakit Jiwa	-
		f. Rumah Sakit Bersalin	-
		g. Rumah Bidan	1
		h. PKD	1
		i. Apotik	1

No	Sub Bidang	Uraian	Jumlah
4	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga	
		1. Lapangan Sepak Bola	1
		2. Lapangan Bola Voly	2
		3. Lapangan Bulu Tangkis	2
		4. Lapangan Futsal	-
		5. Meja Tennis	1
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan	
		1. Gelanggang Remaja	-
		2. Gedung Kesenian	-
		3. Gedung Teater	-
		4. Gedung Bioskop	-
		c. Sarana Sosial	
		1. Panti Asuhan	-
		2. Panti Pijat Tuna Netra	-
		3. Panti Wreda	-
		4. Panti Jompo	-
		d. Sarana Komunikasi	
		1. Radio Komunitas (Jumlah)	-
		2. Papan Pengumuman (Jumlah)	5
5	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan	-
		b. Industri Besar	-
		c. Industri Kecil	-
		d. Industri Rumah Tangga	30
		e. Tempat Rekreasi	1
		f. Sanitasi	74
		g. Restoran/Rumah Makan	3
		h. Saluran Irigasi	750 m

Form C.3

LAMPIRAN KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

No	Sub Bidang	Uraian	Jumlah
1	Sosialisasi Produk Hukum	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Desa	
		1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 4 Tahun 2014 (Berapa Kali)	3
		3. Peraturan Menteri Desa (Berapa Kali)	7
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1. Sosialisasi Peraturan daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	10 Kali
		2. Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	7 Kali
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	10 Kali
		1. Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa Kali)	7 Kali
		2. Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa Kali)	10 Kali
		3. Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-
2	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	7 Kali
		b. Masyarakat Menyampaikan Informasi Kepada Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh Informasi dan Pelayanan yang adil (Ada/Tidak)	Ada
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan Ketentraman dan Ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai Kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	2
		b. Sosialisasi mengenai Ketentraman dan Ketertiban masyarakat (Berapa Kali)	4
		c. Sosialisasi mengenai Lingkungan Hidup (Berapa Kali)	2
		d. Sosialisasi mengenai Bahaya Norkoba (Berapa Kali)	-
4	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	5
		b. Masjid (Jumlah)	3
		c. Mushola (Jumlah)	30
		d. TPQ (Jumlah)	2
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	90
		f. Organisasi Keagamaan (Jumlah)	5

LAMPIRAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Form C.5

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PADA AKHIR BULAN DESEMBER 2023

Kepala Desa Pandansari



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

Lampiran I
Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023



KEPALA DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2024



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 1 TAHUN 2024

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

Menimbang : a bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 70 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes ;
b bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pandansari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa Pandansari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

21 | Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD)

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 9 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1295);
- 25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
- 27 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
- 28 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
- 29 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

- 30 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 31 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
- 32 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga
- 33 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga;
- 34 Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan pada lingkungan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- 35 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2029 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 36 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan aset Desa;
- 37 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 161 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penetapan bagian dari hasil Pajak daerah dan retribusi daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 38 Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2019 Nomor 3);
- 39 Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5);
- 40 Peraturan Desa Pandansari Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023(Lembaran Desa Pandansari Tahun 2022 Nomor 7);
- 41 Peraturan Desa Pandansari Nomor 08 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2023(Lembaran Desa Pandansari Tahun 2022 Nomor 8);
- 43 Peraturan Desa Pandansari Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2022 Nomor 9).
- 43 Peraturan Kepala Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2023.
- 44 Peraturan Desa Pandansari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) Tahun 2023 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2023 Nomor 2).
- 45 Peraturan Kepala Desa Pandansari Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2023.
- 46 Peraturan Kepala Desa Pandansari Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA PANDANSARI TENTANG LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANSARI TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA PANDANSARI TENTANG LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANSARI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.979.781.072,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	827.143.982,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	801.302.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	60.285.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	49.506.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	<u>122.525.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	1.860.762.482,00
Surplus/(Defisit)	Rp	119.018.590,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.823.095,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	107.000.000,00
Jumlah Pembiayaan (a - b)	Rp	(101.176.905,00)
4. Silpa/Silpa Tahun Berjalan	Rp	17.841.685,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Laporan Keuangan terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 ;
 - b. Catatan Atas Laporan Keuangan;
2. Laporan Realisasi Kegiatan
3. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pandansari
pada tanggal Januari 2024



Diundangkan di Pandansari
pada tanggal Januari 2024
SEKRETARIS DESA PANDANSARI



SUKANDAR
LEMBARAN DESA PANDANSARI TAHUN 2024 NOMOR 1

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		2.331.225.000,00	1.973.158.125,00	358.066.875,00
Dana Desa		1.152.625.000,00	1.152.625.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		38.829.000,00	38.829.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		706.771.000,00	706.704.125,00	66.875,00
Bantuan Keuangan Provinsi		263.000.000,00	5.000.000,00	258.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		170.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		6.746.700,00	6.622.947,00	123.753,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.337.971.700,00	1.979.781.072,00	358.190.628,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		830.817.033,00	827.143.982,00	3.673.051,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.164.631.962,00	801.302.000,00	363.329.962,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		66.555.000,00	60.285.000,00	6.270.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		50.035.500,00	49.506.500,00	529.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		124.755.300,00	122.525.000,00	2.230.300,00
JUMLAH BELANJA		2.236.794.795,00	1.860.762.482,00	376.032.313,00
SURPLUS / (DEFISIT)		101.176.905,00	119.018.590,00	(17.841.685,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		5.823.095,00	5.823.095,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		107.000.000,00	107.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(101.176.905,00)	(101.176.905,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	17.841.685,00	(17.841.685,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Pandansari, 31 December 2023

KEPALA DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	2.331.225.000,00	1.973.158.125,00	358.066.875,00
4.2.1.	Dana Desa	1.152.625.000,00	1.152.625.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.829.000,00	38.829.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	706.771.000,00	706.704.125,00	66.875,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	263.000.000,00	5.000.000,00	258.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	170.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.746.700,00	6.622.947,00	123.753,00
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	6.496.700,00	6.496.700,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	250.000,00	126.247,00	123.753,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.337.971.700,00	1.979.781.072,00	358.190.628,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	686.086.000,00	686.018.541,00	67.459,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.220.000,00	76.220.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	541.938.000,00	541.938.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.228.000,00	41.160.541,00	67.459,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.800.843,00	301.591.141,00	103.209.702,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	119.650.895,00	111.587.700,00	8.063.195,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	103.290.000,00	102.540.000,00	750.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	32.394.000,00	32.230.000,00	164.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	15.321.458,00	14.478.441,00	843.017,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada N	123.889.490,00	33.500.000,00	90.389.490,00
5.3.	Belanja Modal	1.021.152.652,00	750.627.800,00	270.524.852,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	54.185.000,00	54.135.000,00	50.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	253.000.000,00	186.800.000,00	66.200.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	621.297.300,00	467.022.800,00	154.274.500,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	62.500.000,00	12.500.000,00	50.000.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	30.170.352,00	30.170.000,00	352,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	124.755.300,00	122.525.000,00	2.230.300,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	124.755.300,00	122.525.000,00	2.230.300,00
	JUMLAH BELANJA	2.236.794.795,00	1.860.762.482,00	376.032.313,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	101.176.905,00	119.018.590,00	(17.841.685,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.823.095,00	5.823.095,00	0,00

Printed by Siskodes

31/12/2023 15:24:38

Halaman 1

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.823.095,00	5.823.095,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(101.176.905,00)	101.176.905,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	17.841.685,00	(17.841.685,00)



Pandansari, 31 December 2023

KEPALA DESA

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.331.225.000,00	1.973.158.125,00	358.066.875,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.152.625.000,00	1.152.625.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.152.625.000,00	1.152.625.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.829.000,00	38.829.000,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	38.829.000,00	38.829.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	706.771.000,00	706.704.125,00	66.875,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	706.771.000,00	706.704.125,00	66.875,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	263.000.000,00	5.000.000,00	258.000.000,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	263.000.000,00	5.000.000,00	258.000.000,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	170.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	170.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.746.700,00	6.622.947,00	123.753,00
	4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	6.496.700,00	6.496.700,00	0,00
	4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	6.496.700,00	6.496.700,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	250.000,00	126.247,00	123.753,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	250.000,00	126.247,00	123.753,00
		JUMLAH PENDAPATAN	2.337.971.700,00	1.979.781.072,00	358.190.628,00
	5.	BELANJA			
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	830.817.033,00	827.143.982,00	3.673.051,00
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	735.104.888,00	733.734.621,00	1.370.267,00
	1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.220.000,00	76.220.000,00	0,00
	1.1.1	5.1. Belanja Pegawai	76.220.000,00	76.220.000,00	0,00
	1.1.1	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.220.000,00	76.220.000,00	0,00
	1.1.1	5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa	48.620.000,00	48.620.000,00	0,00
	1.1.1	5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
	1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	541.938.000,00	541.938.000,00	0,00
	1.1.2	5.1. Belanja Pegawai	541.938.000,00	541.938.000,00	0,00
	1.1.2	5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	541.938.000,00	541.938.000,00	0,00
	1.1.2	5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	348.738.000,00	348.738.000,00	0,00
	1.1.2	5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa	193.200.000,00	193.200.000,00	0,00
	1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.228.000,00	41.160.541,00	67.459,00
	1.1.3	5.1. Belanja Pegawai	41.228.000,00	41.160.541,00	67.459,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Des</i>	41.228.000,00	41.160.541,00	67.459,00
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	16.095.600,00	16.028.725,00	66.875,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.800.512,00	2.800.512,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	20.087.888,00	20.087.304,00	584,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	17.229.398,00	16.476.080,00	753.318,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.229.398,00	16.476.080,00	753.318,00
1.1.4	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	11.581.940,00	11.580.000,00	1.940,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.606.940,00	2.605.000,00	1.940,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	3.147.458,00	2.396.080,00	751.378,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.800.000,00	1.607.830,00	192.170,00
1.1.4	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	651.700,00	534.000,00	117.700,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	300.000,00	229.000,00	71.000,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	395.758,00	25.250,00	370.508,00
1.1.4	5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.389.490,00	29.840.000,00	549.490,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.389.490,00	29.840.000,00	549.490,00
1.1.6	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	21.000.000,00	20.850.000,00	150.000,00
1.1.6	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	21.000.000,00	20.850.000,00	150.000,00
1.1.6	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	7.500.000,00	7.490.000,00	10.000,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	3.150.000,00	3.140.000,00	10.000,00
1.1.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	1.889.490,00	1.500.000,00	389.490,00

URAIAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
3		4	5	6
99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1.889.490,00	1.500.000,00	389.490,00
	<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>28.000.000,00</u>	<u>28.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
	Belanja Modal	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris F	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
	<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	<u>5.810.000,00</u>	<u>3.800.000,00</u>	<u>2.010.000,00</u>
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.610.000,00	2.600.000,00	2.010.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	4.610.000,00	2.600.000,00	2.010.000,00
	Belanja Barang Perlengkapan	2.660.000,00	1.400.000,00	1.260.000,00
01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.325.000,00	300.000,00	1.025.000,00
05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	335.000,00	100.000,00	235.000,00
06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium	1.950.000,00	1.200.000,00	750.000,00
04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	750.000,00	0,00	750.000,00
	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
03.	Belanja Kursus Pelatihan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	<u>50.652.100,00</u>	<u>50.410.903,00</u>	<u>241.197,00</u>
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.900.000,00	5.750.000,00	150.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	5.750.000,00	150.000,00
	Belanja Barang Perlengkapan	5.900.000,00	5.750.000,00	150.000,00
06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.900.000,00	5.750.000,00	150.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00
	Belanja Barang Perlengkapan	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00
01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00
06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	307.500,00	307.500,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.270.600,00	6.270.600,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	6.270.600,00	6.270.600,00	0,00
	Belanja Barang Perlengkapan	6.270.600,00	6.270.600,00	0,00
01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00
05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.112.600,00	2.112.600,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	36.814.000,00	36.722.803,00	91.197,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.629.000,00	17.587.803,00	41.197,00
1.4.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	550.000,00	550.000,00	0,00
1.4.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	550.000,00	550.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.4.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	9.924.000,00	9.882.803,00	41.197,00
1.4.8	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	9.924.000,00	9.882.803,00	41.197,00
1.4.8	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00
1.4.8	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00
1.4.8	5.3.	Belanja Modal	19.185.000,00	19.135.000,00	50.000,00
1.4.8	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	19.185.000,00	19.135.000,00	50.000,00
1.4.8	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.185.000,00	19.135.000,00	50.000,00
1.5		<u>Sub Bidang Pertanahan</u>	<u>11.250.045,00</u>	<u>11.198.458,00</u>	<u>51.587,00</u>
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.250.045,00	11.198.458,00	51.587,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.045,00	11.198.458,00	51.587,00
1.5.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.950.045,00	2.948.900,00	1.145,00
1.5.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.504.245,00	2.504.000,00	245,00
1.5.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	445.800,00	444.900,00	900,00
1.5.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00
1.5.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00
1.5.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.250.000,00	2.199.558,00	50.442,00
1.5.6	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	2.250.000,00	2.199.558,00	50.442,00
1		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.164.631.962,00</u>	<u>801.302.000,00</u>	<u>363.329.962,00</u>
1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>28.500.000,00</u>	<u>28.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
1.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.10	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.10	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>78.400.000,00</u>	<u>77.365.000,00</u>	<u>1.035.000,00</u>
2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00
2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00
2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
2.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
2.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.2.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.1	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	61.350.000,00	60.315.000,00	1.035.000,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.850.000,00	57.815.000,00	1.035.000,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.050.000,00	12.050.000,00	1.000.000,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	13.050.000,00	12.050.000,00	1.000.000,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.165.000,00	35.000,00
2.2.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.200.000,00	3.165.000,00	35.000,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
2.2.2	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	690.431.962,00	536.137.000,00	154.294.962,00
2.3.1		Pemeliharaan Jalan Desa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
2.3.1	5.3.	Belanja Modal	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
2.3.1	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
2.3.1	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
2.3.4		Pemeliharaan Jembatan Desa	14.744.000,00	14.744.000,00	0,00
2.3.4	5.3.	Belanja Modal	14.744.000,00	14.744.000,00	0,00
2.3.4	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	14.744.000,00	14.744.000,00	0,00
2.3.4	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3.4	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	9.744.000,00	9.744.000,00	0,00
2.3.6		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
2.3.6	5.3.	Belanja Modal	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
2.3.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
2.3.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	361.028.000,00	210.926.500,00	150.101.500,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	361.028.000,00	210.926.500,00	150.101.500,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	361.028.000,00	210.926.500,00	150.101.500,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	91.650.000,00	45.790.000,00	45.860.000,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	255.028.000,00	157.286.500,00	97.741.500,00
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	14.350.000,00	7.850.000,00	6.500.000,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	225.698.310,00	222.015.200,00	3.683.110,00
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.464.310,00	10.444.200,00	20.110,00
2.3.12	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.789.310,00	2.789.200,00	110,00
2.3.12	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.687.000,00	1.687.000,00	0,00
2.3.12	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.102.310,00	1.102.200,00	110,00
2.3.12	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.130.000,00	7.130.000,00	0,00
2.3.12	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
2.3.12	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
2.3.12	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	545.000,00	525.000,00	20.000,00
2.3.12	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	545.000,00	525.000,00	20.000,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	215.234.000,00	211.571.000,00	3.663.000,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	215.234.000,00	211.571.000,00	3.663.000,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	38.170.000,00	38.170.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	177.064.000,00	173.401.000,00	3.663.000,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	25.391.300,00	24.881.300,00	510.000,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	25.391.300,00	24.881.300,00	510.000,00
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	25.391.300,00	24.881.300,00	510.000,00
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	20.771.300,00	20.261.300,00	510.000,00
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
2.3.15	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
2.3.15	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
2.3.15	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan	27.740.500,00	27.740.500,00	0,00
2.3.15	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Admin	1.659.500,00	1.659.500,00	0,00
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	10.370.352,00	10.370.000,00	352,00
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	10.370.352,00	10.370.000,00	352,00
2.3.20	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	10.370.352,00	10.370.000,00	352,00
2.3.20	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	10.370.352,00	10.370.000,00	352,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	208.000.000,00	0,00	208.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.800.000,00	0,00	91.800.000,00
2.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepa	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2.4.1	5.3.	Belanja Modal	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
2.4.1	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
2.4.1	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.4.11	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.4.11	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	19.580.000,00	0,00	19.580.000,00
2.4.11	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahai	30.420.000,00	0,00	30.420.000,00
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.4.12	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.4.12	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Ma	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
2.6.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada an Sarana & Prasarana Transportasi Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
2.6.5	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
2.6.5	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
2.6.5	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Ma	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
2.8		Sub Bidang Pariwisata	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
2.8.2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
2.8.2	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
2.8.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
2.8.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00
2.8.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahai	88.300.000,00	88.300.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	66.555.000,00	60.285.000,00	6.270.000,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
3.1.3		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
3.1.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
3.1.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.500.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya	12.500.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.500.000,00	6.250.000,00	3.250.000,00
3.2.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	9.500.000,00	6.250.000,00	3.250.000,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
3.3.5	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
3.3.5	5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.305.000,00	35.285.000,00	20.000,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	24.860.000,00	24.860.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.860.000,00	24.860.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	250.000,00	250.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	165.000,00	165.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	85.000,00	85.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.860.000,00	19.860.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	19.860.000,00	19.860.000,00	0,00
3.4.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
3.4.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	10.445.000,00	10.425.000,00	20.000,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.445.000,00	10.425.000,00	20.000,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	388.000,00	388.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	147.000,00	147.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	240.000,00	240.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.170.000,00	1.150.000,00	20.000,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.170.000,00	1.150.000,00	20.000,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	50.035.500,00	49.506.500,00	529.000,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.1	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4.2.1	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4.2.1	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.823.000,00	23.744.000,00	79.000,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	21.579.000,00	21.500.000,00	79.000,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.579.000,00	21.500.000,00	79.000,00
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	340.000,00	340.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	800.000,00	800.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	800.000,00	800.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.679.000,00	12.600.000,00	79.000,00
4.3.2	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	1.579.000,00	1.500.000,00	79.000,00
4.3.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	994.000,00	994.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	104.000,00	104.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	500.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	240.000,00	240.000,00	0,00
4.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00
4.3.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	800.000,00	800.000,00	0,00
4.3.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	100.000,00	100.000,00	0,00
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	350.000,00	350.000,00	0,00
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	350.000,00	350.000,00	0,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	18.212.500,00	17.762.500,00	450.000,00
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.212.500,00	17.762.500,00	450.000,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.212.500,00	10.762.500,00	450.000,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.962.500,00	5.512.500,00	450.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.512.500,00	5.512.500,00	0,00
4.4.1	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
4.4.1	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.4.1	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.4.1	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.5.2		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.5.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.5.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	124.755.300,00	122.525.000,00	2.230.300,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.355.300,00	18.125.000,00	2.230.300,00
5.1.0		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.355.300,00	18.125.000,00	2.230.300,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.355.300,00	18.125.000,00	2.230.300,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	20.355.300,00	18.125.000,00	2.230.300,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	20.355.300,00	18.125.000,00	2.230.300,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			2.236.794.795,00	1.860.762.482,00	376.032.313,00
SURPLUS / (DEFISIT)			101.176.905,00	119.018.590,00	(17.841.685,00)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.823.095,00	5.823.095,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	5.823.095,00	5.823.095,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	5.823.095,00	5.823.095,00	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			(101.176.905,00)	(101.176.905,00)	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	17.841.685,00	(17.841.685,00)

Pandansari, 31 December 2023

KEPALA DESA





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2023

Informasi Umum

Desa Pandansari merupakan Salah satu Desa di Wilayah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 5 (lima) Dusun, 7 (tujuh) RW dan 18 (delapan belas) RT dan Selaku Pengelolaan Keuangan Desa adalah Sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Kepala Desa | : Ridi |
| 2. Sekretaris Desa | : Sukandar |
| 3. Kepala Urusan Keuangan | : Demi Sumarti |
| 4. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | : Eni Suprapti |
| 5. Kepala Urusan Perencanaan | : Sono |
| 6. Kepala Seksi Pemerintahan | : Hadirin |
| 7. Kepala Seksi Kesejahteraan | : Radi |
| 8. Kepala Seksi Pelayanan | : Untung Wahyono |

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jln.Raya Wringin RT 017 RW 007 Kode Pos 53392 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

Uraian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas			5.823.095
SILPA tahun anggaran 2022			
Mutasi Potongan Pajak			
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		0	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan		0	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan		0	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara			0
Saldo Kas per 31 Desember 2022			5.823.095

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli Desa terdiri dari :

Pendapatan asli Desa terdiri dari :

- Hasil Usaha
- Hasil Aset
- Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
- Lain-lain PADes yang sah

Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
Tahap 1	303.894.900	303.894.900	-
Tahap 2	303.894.900	303.894.900	-
Tahap 3	300.793.200	300.793.200	-
Tambahan Dana Desa	139.642.000	139.642.000	-
Tahap 1 (BLT DD)	26.100.000	26.100.000	-
Tahap 2 (BLT DD)	26.100.000	26.100.000	-
Tahap 3 (BLT DD)	26.100.000	26.100.000	-
Tahap 4 (BLT DD)	26.100.000	26.100.000	-
	1.152.625.000	1.152.625.000	-

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
Tahap 1	22.350.000	22.350.000	-
Tahap 2	16.479.000	16.479.000	-
	38.829.000	38.829.000	-

8. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
Januari	56.350.000	56.350.000	-
Februari	56.350.000	56.350.000	-
Maret	56.350.000	56.350.000	-
April	56.350.000	56.350.000	-
Penyaluran Tambahan	30.566.000	30.566.000	-
Mei	56.350.000	56.350.000	-
Juni	56.350.000	56.350.000	-
Juli	56.350.000	56.350.000	-
Agustus	56.350.000	56.350.000	-
September	56.350.000	56.350.000	-
Oktober	56.350.000	56.350.000	-
November	56.350.000	56.350.000	-
Desember	56.355.000	56.355.000	-
	706.771.000	706.771.000	0

9. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
Bankeupemdes Sarpras	150.000.000	-	150.000.000
Bankeupemdes RTLH	108.000.000	-	108.000.000
Bankeupemdes Operasional KPMD	5.000.000	5.000.000	-
	263.000.000	5.000.000	258.000.000

10. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Purbalingga adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
Bantuan Keuangan Kabupaten	170.000.000	70.000.000	100.000.000
	-	-	0
	170.000.000	70.000.000	100.000.000

11. Pendapatan Lain-lain

- Pendapatan lain-lain terdiri dari:	-	-	-
- Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	6.496.700	6.496.700	-
- Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	-	-	-
- Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	-
- Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	-	-	-
- Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	-	-	-
- Bunga bank	250.000	126.247	123.753
- Lain-lain pendapatan yang sah	-	-	-
	6.746.700	6.622.947	200.123.753

12. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
Belanja Pegawai	686.086.000	686.018.541	67.459
Belanja Barang dan Jasa	49.018.888	47.716.080	1.302.808
Belanja Modal	-	-	-
	735.104.888	733.734.621	1.370.267

13. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	213.964.310	121.109.200	92.855.110
Belanja Modal	950.667.652	680.192.800	270.474.852
	1.164.631.962	801.302.000	363.329.962

Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
53.755.000	47.485.000	6.270.000
12.800.000	12.800.000	-
66.555.000	60.285.000	6.270.000

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
39.535.500	39.006.500	529.000
10.500.000	10.500.000	-
50.035.500	49.506.500	529.000

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2022, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa terdiri dari:

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak

Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
20.355.300	18.125.000	2.230.300
-	-	-
104.400.000	104.400.000	-
124.755.300	122.525.000	2.230.300

Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Belanja Pegawai

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan BPD

Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
76.220.000	76.220.000	-
541.938.000	541.938.000	-
41.228.000	41.160.541	67.459
26.700.000	26.700.000	-
686.086.000	686.018.541	67.459

Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang Perlengkapan Kantor
- Belanja Jasa Honorarium
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Jasa sewa
- Belanja Operasional Perkantoran
- Belanja Pemeliharaan
- Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat

Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
119.650.895	111.586.800	8.064.095
103.290.000	102.540.000	750.000
32.394.000	32.230.000	164.000
6.000.000	3.000.000	3.000.000
15.321.458	14.478.441	843.017
4.255.000	4.255.000	-
33.889.490	33.500.000	389.490
314.800.843	301.590.241	13.210.602

Belanja Modal

- Belanja Modal Pengadaan Tanah
- Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
- Belanja Modal Kendaraan
- Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
- Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
- Belanja Modal Jembatan
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Limbah
- Belanja Modal Jaringan/Instalasi
- Belanja Modal lainnya

Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
-	-	-
54.185.000	54.135.000	50.000
-	-	-
253.000.000	186.800.000	66.200.000
621.297.300	467.022.800	154.274.500
-	-	-
-	-	-
62.500.000	12.500.000	50.000.000
30.170.352	30.170.000	352
1.021.152.652	750.627.800	270.524.852

Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

- Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
735.104.888	733.734.621	1.370.267
28.000.000	28.000.000	-

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.810.000	3.800.000	2.010.000
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.652.100	50.410.903	241.197
Sub Bidang Pertanahan	11.250.045	11.198.458	51.587
	<u>830.817.033</u>	<u>827.143.982</u>	<u>3.673.051</u>
Bidang Pembangunan Desa	28.500.000	28.500.000	-
Sub Bidang Pendidikan	78.400.000	77.365.000	1.035.000
Sub Bidang Kesehatan	690.431.962	536.137.000	154.294.962
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	208.000.000	-	208.000.000
Sub Bidang Kawasan Permukiman	-	-	-
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	24.300.000	24.300.000	-
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
Sub Bidang Pariwisata	135.000.000	135.000.000	-
	<u>1.164.631.962</u>	<u>801.302.000</u>	<u>363.329.962</u>
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	5.950.000	5.950.000	-
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.500.000	6.250.000	6.250.000
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	12.800.000	12.800.000	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.305.000	35.285.000	20.000
	<u>66.555.000</u>	<u>60.285.000</u>	<u>6.270.000</u>
Belanja- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.500.000	5.500.000	-
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.823.000	23.744.000	79.000
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.212.500	17.762.500	450.000
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2.500.000	2.500.000	-
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-	-
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-
	<u>50.035.500</u>	<u>49.506.500</u>	<u>529.000</u>
Belanja-Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.355.300	18.125.000	2.230.300
Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-	-
Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000	104.400.000	-
	<u>124.755.300</u>	<u>122.525.000</u>	<u>2.230.300</u>
Pembiayaan			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(lebih)/kurang</u>
Penerimaan Pembiayaan	5.823.095	5.823.095	0
Pengeluaran Pembiayaan	107.000.000	107.000.000	0
	<u>101.176.905</u>	<u>101.176.905</u>	<u>0</u>
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	5.823.095	5.823.095	-
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	-
4. Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-
	<u>5.823.095</u>	<u>5.823.095</u>	<u>-</u>
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa	107.000.000	107.000.000	-
3. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-
	<u>107.000.000</u>	<u>107.000.000</u>	<u>-</u>
Aset Desa			
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,			
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin dan Alat berat	54.185.000	54.135.000	50.000
Kendaraan	-	-	-

Gedung dan Bangunan

Jalan

Jembatan

Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase

Jaringan/Instalasi

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

253.000.000	186.800.000	66.200.000
621.297.300	467.022.800	154.274.500
-	-	-
-	-	-
62.500.000	12.500.000	50.000.000
30.170.352	30.170.000	352
-	-	-
1.021.152.652	750.627.800	270.524.852

Rincian Aset Tetap untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2023

nyertaan Modal Desa

nyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
102.000.000	102.000.000	0
5.000.000	5.000.000	0
107.000.000	107.000.000	0

MDES

MDESMA



Pandansari, Januari 2024

Kepala Desa Pandansari



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

Lampiran II
Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Desa : Pandansari
Kecamatan : Kejombang
Kabupaten : Purbalingga
Provinsi : Jawa Tengah

LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Norma
Tentang
: 1 Tahun 2024
: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kode Rekening	Uraian	Out Put						Sumber Dana			
		Rencana			Realisasi			Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain-Lain (Rp)	Bentuk Lain
		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)				
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
01.01.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	OB	76.220.000	12	OB	76.220.000		76.220.000		
01.01.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	156	OB	541.938.000	156	OB	541.938.000		541.938.000		
01.01.03	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	OB	41.228.000	12	OB	41.160.541		41.228.000		
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1	Paket	5.906.940	1	Paket	5.641.830		5.906.940		
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1	Paket	4.425.000	1	Paket	4.425.000			4.425.000	
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1	Paket	6.897.458	1	Paket	6.409.250			6.897.458	
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	7	OB	26.700.000	7	OB	26.700.000		26.700.000		
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD	1	Paket	1.400.000	1	Paket	1.400.000			1.400.000	
01.01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari DD	3	Paket	30.389.490	3	Paket	29.840.000			30.389.490	
01.02.01	Penyediaan Sarana Aset Perkantoran	1	Paket	28.000.000	1	Paket	28.000.000			28.000.000	
01.03.02	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil	1	Paket	4.610.000	1	Paket	2.600.000				
01.03.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pem. Desa	1	Paket	1.200.000	1	Paket	1.200.000				

01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	8	Keg	5.900.000	8	Keg	5.750.000	97,5	5.900.000			
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1	Keg	1.667.500	1	Keg	1.667.500	100,0	1.667.500			
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2	Keg	6.270.600	2	Keg	6.270.600	100,0	6.270.600			
01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Paket	36.814.000	1	Paket	36.722.803	99,8	36.814.000			
01.05.06	Administrasi PBB	1	Paket	11.250.045	1	Paket	11.198.458	99,5		11.250.045		
02	Bidang Pembangunan											
02.01	Sub Bidang Pendidikan	2	Paket	28.500.000	2	Paket	28.500.000	100,0	28.500.000			
02.02	Sub Bidang Kesehatan	2	Paket	78.400.000	2	Paket	77.365.000	98,7	78.400.000			
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7	Paket	498.431.962	7	Paket	494.137.000	99,1	498.431.962			
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2	Paket	42.000.000	1	Paket	42.000.000	100,0		42.000.000		
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2	Paket	150.000.000	-	-	-	-		150.000.000		
02.04	Sub Bidang Kawasan Permukiman	2	Paket	100.000.000	-	-	-	-		100.000.000		
02.04	Sub Bidang Kawasan Permukiman	9	Unit	108.000.000	-	-	-	-		108.000.000		
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2	Paket	24.300.000	2	Paket	24.300.000	100,0	24.300.000			
02.08	Sub Bidang Pariwisata	1	Paket	135.000.000	1	Paket	135.000.000	100,0	135.000.000			
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
03.01	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum											
03.01.03	Kordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban	1	Paket	5.950.000	1	Paket	5.950.000	100,0		5.950.000		
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan											
03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian	1	Paket	12.500.000	1	Paket	6.250.000	50,0	12.500.000			
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga											
03.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Olahraga	1	Paket	12.800.000	1	Paket	12.800.000	100,0	12.800.000			
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat											
03.04.02	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	1	Paket	16.080.000	1	Paket	16.080.000	100,0		16.080.000		
03.04.02	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	1	Paket	3.780.000	1	Paket	3.780.000	100,0		3.780.000		
03.04.02	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	1	Paket	5.000.000	1	Paket	5.000.000	100,0		5.000.000		



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

Lampiran II
Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023

**DAFTAR PROGRAM
SEKTORAL, PROGRAM DAERAH
DAN PROGRAM LAINNYA YANG
MASUK KE DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

DESA : PANDANSARI
KECAMATAN: KEJOBONG
KABUPATEN: PURBALINGGA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Program	Kegiatan			Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1	KPM-PKH	Bantuan	Pandansari		-	Kemensos RI
2	BPNT	Bantuan	Pandansari		-	Kemensos RI
3	Bantuan Disabilitas	Bantuan	Pandansari	2 Orang	7.200.000	Kemensos RI
4	Rantang Berkah	Bantuan	Pandansari	14 KPM	-	APBD-Kab
5	BLT-EL NINO	Bantuan	Pandansari	142 KK	56.800.000	Kemensos RI
6	SPAL-DS	Program	Pandansari	74 Unit	518.000.000	DAK Sanitasi
7	SPAM dan Jaringan	Program	Pandansari	1 Paket	265.284.000	DAK APBD
8	Bantaun Portland Cement	Bantuan	Pandansari	50 Zak	3.000.000	APBD-Kab

KETUA DESA PANDANSARI

